



## Sosialisasi Pentingnya Data Statistik Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki KTP (Studi Kasus Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

Faros Hafidz Muhammad Trizhardi<sup>1</sup>,

<sup>1,2</sup> (Prodi Ekonomi Pembangunan/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – UPN “Veteran”  
Jawa Timur)

### Abstract

Received: 05 Oktober 2024  
Revised: 11 Oktober 2024  
Accepted: 19 Oktober 2024

Penelitian ini berfokus pada kendala yang terjadi Di Desa Kunir Lor Kabupaten Lumajang. Kendala yang dihadapi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lumajang berupa masyarakat yang kurang andil terhadap partisipasinya terhadap data statistik salah satu contohnya mengenai topik yang diangkat kali ini yakni masih tidak adanya KTP dalam data kependudukan. Tentu hal ini akan menyulitkan jalannya proses Sensus Kependudukan daerah Lumajang. Berfokuskan pada masyarakat daerah pelosok desa yang jauh dari jangkauan perkotaan. Didukung dengan demografi dari Daerah Lumajang dan kondisi topografi yang relatif pegunungan memungkinkan hal tersebut bisa saja terjadi. Metode yang akan digunakan berupa sosialisasi via zoom pendampingan kepada karang taruna daerah tersebut dan dihadiri oleh KOSEKA (Koordinator Sensus Kecamatan) langsung sebagai pemberi informasi mengenai kondisi data kependudukan Daerah Kunir.

### Keywords:

BPS, KTP, Desa Kunir Lor

(\*) Corresponding Author:

[21011010203@student.upnjatim.ac.id](mailto:21011010203@student.upnjatim.ac.id)  
[sishadiyati.ep@upnjatim.ac.id](mailto:sishadiyati.ep@upnjatim.ac.id)

**How to Cite:** Trizhardi, F. H. (2024). Sosialisasi Pentingnya Data Statistik Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki KTP ( Studi Kasus Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 358-364. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14159538>

## PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Kegunaan statistika sangat penting di dalam beberapa bidang. Peran statistika dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan sangatlah diharapkan dalam kemajuan suatu negeri. Dalam dunia bisnis, peran statistika digunakan untuk membuat analisis keuangan, mengembangkan perencanaan pemasaran, serta memprediksi tren pasar. Di bidang medis, statistika digunakan untuk melakukan uji coba klinis dan mengembangkan obat baru. Ahli ekonomi menggunakan statistika untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, sementara ahli lingkungan menggunakan statistika untuk memantau polusi lingkungan dan perubahan iklim. Cukup banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi dari

statistika. Menurut Gasperz (1989), statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan serta analisisnya, penarikan kesimpulan, hingga pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Somantri turut berpendapat bahwa statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menginterpretasi data supaya dapat disajikan secara sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bawasannya statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menginterpretasi data sehingga data dapat digunakan dengan sebaik baiknya.

Kartu Tanda Penduduk (disingkat KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Sejak tahun 2011, KTP nonelektronik digantikan dengan KTP elektronik (KTP-el). Sebelumnya KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, kecuali warga berusia 60 tahun ke atas yang KTP-nya berlaku seumur hidup. Setelah adanya KTP-el, KTP bagi WNI berlaku seumur hidup untuk semua umur. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap.

Sejarah Desa Kunir Lor tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Samin di Kabupaten Lumajang. Desa ini awalnya bernama Desa Kunir dengan Kepala Desa yang bernama P. JOYO pada tahun 1950. Kepala Desa P.JOYO adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat samin. Karena adanya semangat perubahan dan keluasan wilayah maka desa Kunir ini pada tahun 1976 dipecah menjadi Desa Kunir Lor dan Desa Kunir Kidul. Sedangkan Kepala Desa Kunir Lor yang pertama kali adalah Bapak SOEDJONO. Nama Desa Kunir Lor didasarkan pada banyaknya Tanaman Kunir yang ada di desa ini. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

SOEDJONO (tahun 1976 s.d 1989), SUDIARTO (tahun 1990 s.d 1998),  
BAMBANG

SOEMARTONO (tahun 1999 s.d 2007), H.MU'ALI (tahun 2007 s.d 2013),  
HARIONO (tahun 2013 s.d 2019).

Penduduk Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang masih sangat disayangkan terkait dengan kondisi demografinya, mobilitas penduduk yang relatif minim dan daerah pelosok jauh dari perkotaan Didukung dengan demografi dari Daerah Lumajang dan kondisi topografi yang relatif pegunungan memungkinkan hal tersebut mungkin jadi hambatannya dalam kontribusi pendataan demografi. Tidak memiliki KTP menjadi penghambat utama proses pendataan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukannya eksekusi secara cepat karna dari dulu masalah ini cuma berlarut- larut atau berkepanjangan. Hal yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lumajang serta mitranya sejak dulu merupakan langkah penggantian sementara saja, tidak ada langkah yang mengandung persuasif sama

sekali. Seperti halnya data seseorang yang tidak memiliki KTP diganti dengan angka 9 sebanyak 16 digit dalam menjalani proses pengolahandata kependudukan. Tentu ini merupakan hal yang riskan terkait mereka (penduduk lumajang yang memiliki SDM rendah) kebanyakan dari mereka selalu menyangkal petugas dari BPS dan tidak percaya kepada petugas sensus dengan alasan tidak percaya. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses jalannya semua sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Lumajang jika dibiarkan terlalu lama. Menyangkut kondisi mereka yang memiliki pengetahuan minim. Maka dari itu diperlukannya solusi berupa tindakan langsung melalui karangtaruna daerah tersebut supaya bisa disampaikan ke Kepada Desa setempat guna masyarakat mau menjalani proses pendataan secara valid. Tujuan dari adanya karangtaruna serta sampai kepala desa turun tangan adalah supaya mereka tidak lagi skeptis dengan petugas dari BPS Kabupaten Lumajang. Hal itu semua dilakukan dengan tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi kali ini dihadirkan oleh karang taruna daetah setempat serta KOSEKA (Koordinator Sensus Kecamatan) yang merupakan jabatan langsung dari BPS guna membawahi satu kecamatan. Diharapkan dengan hadirnya beliau bisa memberikan banyak informasi terkait masalah kependudukan daerah Kunir. Proses kali ini menawarkan solusi berupa eksekusi door to door alias melakukan kunjungan secara rumah ke rumah yang dilakukan oleh penulis secara pribadi berkolaborasi karang taruna daerah setempat dengan navigasi dari RT setempat terkait dengan warga yang tidak memiliki KTP guna dicatat/didata supaya nantinya bisa diajukan kepada Pihak Pemerintahan Desa dan diharapkan bisa segera diurus ke dispenduk.

## METODE

Sasaran dalam kegiatan ini adalah penduduk yang tidak memiliki KTP secara mutlak yang diwakili oleh karang taruna/muda-mudi Desa Kunir Lor yang merupakan objek untuk dikaji dengan mencari permasalahan yang ada. Selanjutnya mengkaji permasalahan guna menemukan solusi yang tepat sehingga dapat dijadikan sebagai jawaban yang bermanfaat bagi kelangsungan data statistik Kabupaten Lumajang. Sosialisasi menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk memberi tahu kepada muda/mudi terkait penduduk yang tidak memiliki KTP di Daerah Kunir Lor.

Adapun tahapan yang untuk metode pada jurnal ini adalah sebagai berikut

No	Langkah-Langkah
1	Masalah muncul Ketika penulis mengikuti sensus penduduk 2020
2	Mengunjungi kantor BPS Lumajang guna memperoleh data
3	Melakukan pengunjungan kepada RT setempat guna navigasi masyarakat yang tidak memiliki KTP
4	Mengidentifikasi terkait masyarakat yang tidak memiliki KTP
5	Melakukan sosialisasi bersama karang taruna serta dihadiri oleh KOSEKA wilayah Kunir guna saling memberikan informasi
6	Evaluasi terkait solusi serta hasil dari masyarakat yang tidak memiliki KTP

Adapun timeline dari sosialisasi yang dilakukan, sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	29 Desember 2023	Mengunjungi Kantor BPS Lumajang guna memperoleh data secara primer kepada KOSEKA wilayah Kunir
2	31 Desember 2023	Melakukan kunjungan kepada RT setempat untuk mengetahui dari warganya terkait data kependudukan
3	1 Januari 2024	Melakukan Sosialisasi yang dihadiri oleh karang taruna Kunir Lor serta KOSEKA wilayah Kunir
4	2 Januari 2024	Berkolaborasi dengan karang taruna setempat untuk keliling door to door kepada rumah masyarakat yang tidak memiliki KTP.

Kegiatan sosialisasi dirancang khusus untuk membantu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS serta mitranya supaya menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan sosialisasi melalui visa zoom yang dihadirkan oleh KOSEKA (Koordinator Sensus Kecamatan) Kunir lagsung serta muda/mudi Kunir Lor diharapkan dapat langsung membawa perubahan signifikan. Diharapkan dengan pertemuan ini juga para muda/mudi dapat langsung cepat tanggap dan melapor kepada Kepala Desa Kunir Lor terkait penduduknya yg masih relatid banyak tidak memiliki KTP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian ini yang berupa sosialisasi kepada muda/mudi Daerah Kunir Lor terkait masyarakat setempat yang tidak memiliki KTP. Tidak ada kepemilikan KTP ini rata-rata adalah mereka orang yang memiliki usia lanjut dengan kondisi sebatang kara dan relatif memiliki rumah daerah yang jauh dari pemukiman warga alias samping kebunnya sendiri. Didukung dengan warga Lumajang yang umumnya menjadi petani sawah dan petani kebun.



**Gambar 1. Pengunjungan ke BPS Lumajang**

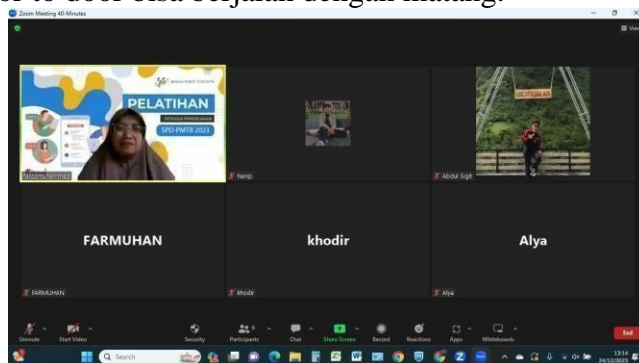
Untuk mengawali proses awal guna mencari data diperlukan adanya wawancara langsung guna kepada KOSEKA Kunir dengan melakukan kunjungan ke BPS Lumajang guna memperoleh kondisi permasalahan riil terkait

permasalahan data kependudukan wilayah kunir. Dikarenakan beliau merupakan seseorang yang membawahi satu kecamatan yaitu Kecamatan Kunir kependudukan yang terjadi di wilayah Kunir. Dalam pertemuan ini didapat informasi dari KOSEKA Kunir diperkirakan jumlah penduduk Kunir Lor yang tidak memiliki KTP berkisar kurang lebih 14 orang dilihat dari Sensus Penduduk 2020 tetapi beliau juga berucap “berjalan dengan waktu mulai SP2020 sampai tahun 2023 ini mulai menurun jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP dikarenakan adanya syarat untuk mendapatkan bantuan diwajibkan memiliki KTP guna data penerima bantuan namun tidak dapat dipastikan berapa sisa penduduk yang masih tidak memiliki KTP” dapat dimungkinkan karena adanya aturan tersebut menjadikan mereka untuk cepat buat mengurus KTP guna mendapatkan bantuan. Dengan pernyataan tersebut yang turun dari ucapan langsung oleh KOSEKA Kunir menjadikan patokan hasil dari penelitian ini.



**Gambar 2.** Kunjungan kepada Kepala RT wilayah setempat

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai bagian wilayah administrasi kalurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kalurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dapat diperkirakan dengan adanya kunjungan kepada Simbah selaku Kepala RT setempat guna sebagai navigator guna mengetahui masyarakat yang masih belum mempunyai KTP. Diperlukan juga terkait lokasi rumah warga yang tidak memiliki KTP supaya eksekusi door to door bisa berjalan dengan matang.



**Gambar 3.** Sosialisasi pentingnya data kependudukan guna lancarnya sebuah pendataan statistik kepada karang taruna

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara sekali dengan dihadirkan oleh KOSEKA (Koordinator Sensus Kecamatan) serta muda/mudi daerah Kunir Lor memungkinkan untuk berbagi informasi terkait berapa kira-kira penduduk yang tidak memiliki KTP. Para muda mudi karang taruna setempat diajak untuk melakukan kolaborasi atau kerja sama terkait pendataan kembali penduduk Wilayah Kunir Lor yang tidak mempunyai KTP. Dalam meet tersebut para muda mudi karang taruna dibina secara langsung oleh KOSEKA Kunir terkait dengan pentingnya suatu data kependudukan dengan berjalannya pendataan statistik oleh BPS Lumajang. Sangat disayangkan ternyata penduduk Kunir Lor yang masih belum memiliki KTP masih tergolong cukup banyak sekitar 13 orang didominasi oleh lansia yang hidup sebatang kara yang berprofesi sebagai petani sawah/kebun. Diharapkan para muda mudi karang taruna setempat dapat mengetahui apa pentingnya suatu data kependudukan dan nantinya para muda mudi akan diajak langsung terjun kepada rumah warga yang tidak memiliki KTP guna mendata supaya bisa segera dilaporkan ke Kepala Desa/Sekdes Kunir Lor guna bisa langsung diterima dan diharapkan dapat segera diurus oleh pihak Pemerintahan Desa kepada Dispenduk Kabupaten Lumajang. sebagai petani sawah/kebun.



**Gambar 4.** Kunjungan Door to Door kepada warga yang tidak memiliki KTP guna dicatat/didata.

## **KESIMPULAN**

Desa Kunir Lor merupakan desa yang dibidang terpencil yang memiliki masalah terhadap data kependudukan. Diantaranya ketidakpunaan KTP yang dipergunakan kevalidasian data kependudukan. Masalah tersebut dibawah oleh faktor umur yakni mereka yang sudah memiliki usia lanjut dan hidup sebatang kara sehingga memungkinkan untuk tidak minat buat mengurus kembali data kependudukannya. Maka dari itu diperlukan eksekusi berupa sosialisasi kepada muda/mudi Kunir Lor yang telah belerja sama dan juga diharapkan dapat terjun langsung guna mengakses terkait biodata warga yang tidak memiliki KTP gunadapat langsung melapor kepada Kepala Desa setempat. Oleh karena itu tujuan dari jurnal pngabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mereka penduduk yang tidak memiliki KTP lebih dalam lagi tentang betapa pentingnya mempunyai KTP guna menjadi terobosan/keringanan bagi pihak pengolah data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

metrotvnews. (2016, February 13). *Sejarah Panjang KTP Indonesia*. Retrieved Desember 19, 2023 from web.archive.org: diakses pada laman <https://web.archive.org/web/20190418192538/http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/12/483325/sejarah-panjang-ktp-indonesi>

- Ariana, R. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis E-Government. 1–23.
- Indonesia, B. (2009). *Panduan Operasional Pengumpulan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statistik*. (S. R. Statistik, Ed.) Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- (A. Syaifullah, Ed.) Lor, S. D. (2017, Januari 31). Desa Kunir Lor.
- FKIP UMSURABAYA. (2023). Peran Statistika Dalam Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan. Diakses pada tanggal 20 (FKIP UM SURABAYA, 2023), Melalui laman [https://fkip.um-surabaya.ac.id/homepage/news\\_article?slug=peran-statistika-dalam-ekonomi-pendidikan-kesehatan-dan-lingkungan](https://fkip.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=peran-statistika-dalam-ekonomi-pendidikan-kesehatan-dan-lingkungan)
- Sinaga, Dameria. "Buku Ajar Statistik Dasar." (2014).
- Kurniasih, N. (2020). Peran Statistik Dalam Penelitian. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(17), 273– 279.
- Nurizzati, Y. (2015). Peranan statistika dalam penelitian sosial ekonomi. 91–105.
- Pradipta, R. N. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).
- Rahim, A. (2013). STATISTIKA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN. *Jurnal Edukasi*.
- Ilyas, A., & Bahagia, B. (2021). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6),